

Vol. I No. I Oktober 2014

ISSN: 2406-7407

Al-Tatwir

JURNAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

Konstruksi Masyarakat Islam Perspektif Perjanjian Madinah
Kun Wazis

Pemberdayaan Versus Developmentalisme
Sofyan Hadi

Membangun Masyarakat Islam Yang Memahami Pluralisme
Saifuddin

Mengubur Kemiskinan Di Negeri Kaya
(Antara Mimpi Dan Realita)
M. Ali Makki

Konflik Peran Ganda Pada Wanita Rumah Tangga Dan Karier
Umi Hanik

Perempuan Di Tengah Keterasingan Kultur
Siti Raudhatul Jannah

Aktualisasi Dakwah Islam (Kajian Analisis Formulasi Dakwah Rasulullah)
Muhammad Barmawi



Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
Jurusan Ushuluddin & Dakwah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember

ISSN : 2406-7407

Al-Tatwir

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

Vol. 1, No. 1 April 2014

**Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Jurusan Ushuluddin dan Dakwah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember**

SK. Ketua STAIN Jember
No. Sti.07/PP.00.9/SK/347/2014

Tentang

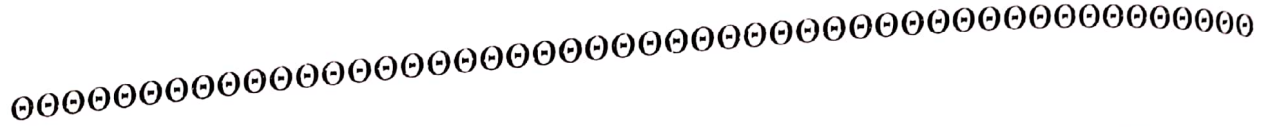
Pengelola Jurnal Al-Tatwir Prodi PMI Jurusan Ushuluddin dan Dakwah
STAIN Jember

- Penanggungjawab** : H. Nur Solikin, S.Ag., M.H
- Redaktur** : M. Ali Makki, M.Si
- Penyunting** : Dr. Ahidul Asror, M.Ag
Drs. H. Ahmad Mutohar, M.M
Dr. Kasman A. Rokhim, M. Fil. I
Muhibbin, S.Ag., M.Si
- Desain Grafis** : Minan Jauhari, S. Sos. I., M.Si
Abd. Hakim, S.E.
- Sekretariat** : Ahmad Fathur Rosyid, S. Sos.
Zayyinah Haririn, M. Pd. I

Alamat Redaksi

**Kantor Jurusan Ushuluddin & Dakwah STAIN Jember
Jl. Jumat No. 94 Mangli Kaliwates Jember-Indonesia
Tlp. (0331) 467550-Fax (0331) 427005**

Daftar Isi



KONSTRUKSI MASYARAKAT ISLAM
 PERSPEKTIF PERJANJIAN MADINAH
Kun Wazis I

PEMBERDAYAAN
 VERSUS DEVELOPMENTALISME
Sofyan Hadi 19

MEMBANGUN MASYARAKAT ISLAM
 YANG MEMAHAMI PLURALISME
Saijuddin 29

MENGUBUR KEMISKINAN DI NEGERI KAYA
 (Antara Mimpi dan Realita)
M. Ali Makki 39

KONFLIK PERAN GANDA
 PADA WANITA RUMAH TANGGA DAN KARIER
Umi Hanik 51

PEREMPUAN
 DI TENGAH KETERASINGAN KULTUR
Siti Raudhatul Jannah 63

AKTUALISASI DAKWAH ISLAM
 (Kajian Analisis Formulasi Dakwah Rasulullah)
Muhammad Barmawi 71

PEREMPUAN DI TENGAH KETERASINGAN KULTUR

Oleh:

Siti Raudhatul Jannah¹

ABSTRAK

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan hak dan kewajiban masing-masing secara adil dan merata. Namun yang terjadi hingga saat ini, posisi perempuan senantiasa tersudut meski kasus dan kondisi yang dialami persis sama dengan yang dihadapi pria. Apakah ini sekedar stigma atau memang ketidaksamaan peran dan fungsi berakibat pada penilaian subyektif oleh pemegang kuasa, yang umumnya pria, atau karena warisan kultur dimana laki-laki lebih diutamakan dari pada wanita sehingga terkesan perempuan itu berada pada kelas dua. Tulisan berikut berupaya menunjukkan betapa perbedaan gender telah berakibat pada besaran stereotip yang diterima kaum hawa.

Kata Kunci : Perempuan, Kultur dan Posisi.

Hukum dan Posisi Wanita

Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan tahun 1979, sampai diratifikasi Indonesia melalui UU no 7 Tahun 1984, belum berekses secara signifikan. Indikasinya, hutang kepada perempuan dalam bentuk beban hidup sehari-hari masih ditanggung perempuan seorang. Dalam masyarakat tradisional seperti kebanyakan ditemukan di Indonesia, perempuan masih jadi pemikul terbanyak beban hidup ini.

Padahal ceramah atau tulisan mengenai teori dan teologi lelaki dan perempuan dikategorikan sebagai dua kutub semartabat yang korelatif dari suatu perkara tunggal yang selaras, namun, kenyataan real empiris historis-nya masih jauh panggang dari api.

Mengacu pada banyak kasus kekerasan dan ketidakadilan pada perempuan yang terjadi pada kelompok masyarakat dengan kelas sosial rendah, hanya perempuan taipan saja yang dapat mendudukan dirinya selaras dengan pria. Saparinah Sadli dalam tulisannya yang berjudul Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia melihat esensi pengertian kelamin dan jender sering disalahartikan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini sering berdampak pada pembagian kerja seksual di ranah domestik sampai publik. Stereotip jender dan pembagian peran yang berkembang dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap terjadinya diskriminasi terhadap wanita, bahkan mengancam wanita dengan aneka kekerasan. Padahal menurut Omas Ihromi, berbagai peraturan perundangan di RI telah melarang terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Namun kenyataan empirik menunjukkan bahwa wanita lah kelamin yang

¹ Dosen Prodi KPI Jurusan Usuluddin & Dakwah STAIN Jember

paling banyak mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. Karenanya, Omas mengkritisi pandangan yang mengatakan bahwa hukum yang diterapkan menurut apa yang terumus di dalamnya akan membawa keadilan. Menurutnya, hubungan antara hukum dan keadilan tidak demikian kausal sifatnya. Alasannya, hukum tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang berlangsung ketika hukum dibuat. Hanya saja, dia masih sangat percaya bahwa memberikan keadilan kepada perempuan dapat dilakukan melalui hukum, dengan memperhatikan perubahan sosial dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Senada dengan Omas, Nursyahbani melihat bahwa hukum sering dijadikan sarana untuk merampas sumberdaya ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hukum lebih berfungsi melanggengkan proses pemiskinan. "Dalam kenyataannya, hukum tidak netral dan asumsi bahwa hukum adalah sebuah institusi untuk memperoleh keadilan harus dipertanyakan kembali. Seharusnya wanita tidak menaruh kepercayaan yang besar kepada hukum. Alasannya, nilai kultural yang berkaitan dengan seksualitas wanita dan nilai yang mencerminkan ketidaksetaraan gender, mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan hukum.

Sementara itu, Koesparmono Irsan, mantan perwira tinggi polisi, melihat alasan mendasar pada tindakan kekerasan yang justru dilakukan pejabat yang seharusnya melindungi wanita. Pertama, politik dan hukum itu sendiri mengandung dimensi kekerasan struktural. Hal ini dipicu perbedaan kepentingan antara penegakan hak asasi manusia atau dijalankannya program atas nama pembangunan. Kedua, banyak peraturan perundangan yang tidak mencerminkan HAK. Ketiga, tidak berfungsinya kontrol sosial oleh semua pihak. Dalam hal ini kekerasan juga digunakan untuk penyelesaian konflik yang disebabkan oleh adanya ketidakadilan di bidang politik, sosial dan ekonomi.

Diakuinya, dalam perkara kekerasan, pada umumnya masyarakat lebih memberi perlindungan terhadap pelaku daripada korban. Korban banyak yang tidak tahu hak-haknya sehingga takut melapor. Di sisi lain, penegak hukum tidak tahu hak-hak korban sehingga sudah puas manakala sudah mampu menegakkan hak-hak pelaku kejahatan. "Perlindungan terhadap individu korban kejahatan justru ditelantarkan oleh banyak pejabat publik. Sementara penjahat dipelihara, dilindungi dan dirawat oleh pemerintah. Merehabilitasi korban kejahatan, terutama wanita, menjadi sulit karena kaena yang harus dibangun kembali adalah rasa susila dan moralitasnya yang terpuruk akibat kejahatan.

Dikotomi Publik Vs Domestik

Sementara itu, pembagian peran secara seksual yakni dengan menempatkan wanita di rumah dan laki-laki di luar rumah, menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi, perempuan menjadi

snagat tergantung kepada suaminya. Kalaupun bekerja, tidak dipandang sebagai manusia yang utuh karena dianggap hanya sebagai pencari tambahan penghasilankeluarga. Akibatnya, perempuan, bahkan pada perempuan PNS, seringkali dianggap tetap lajang sekalipun telah menikah sehingga tidak berhak menerima tunjangan keluarga dan kesehatan karena dianggap telah mendapatkannya dari suaminya.

Ironisnya, pada sistem kapitalisme global yang merajai Indonesia saat ini, kaum perempuan diletakkan sebagai sumber tenaga kerja murah. Celakanya, wanita juga harus mengalami diskriminasi upah dengan laki-laki yang juga baerupah rendah. Ini berarti bahwa kaum wanita memperoleh perlakuan lebih buruk di dunia kerja, bahkan kekerasan dan pelecehan seksual, sebagaimana pada kasus buruh Marsinah yang dibunuh karena menuntut kenaikan upah.

Secara politik, perempuan juga dianggap sekunder dan tidak punya otonomi. Suamilah yang menjadi kepala keluarga, yang menentukan urusan yang bersifat publik. Karenanya, wanita dianggap milik pria, sehingga pemukulan, penyiksaan psikis dan fisik, penelantaran dan perkosaan dalam keluarga (marital rape), tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Posisi wanita di ranah politik tak kalah mengenaskan. Konstruksi sosialmenempatkan wanita tak bisa akif dalam politik. Pria tak menginginkan Aisyah Amini menjadi Ketua PPP pada Kongres ke III-nya karena dia perempuan. Padahal tak ada yang mampu mengalahkannya dalam hal ketokohan, pengalaman dan kemampuan manajerialnya.

Kenyataannya, wanita jarang mendapatkan tempat yang pantas dalam setiap kegiatan. Posisi ketua atau wakil ketua pasti ditempati pria, wanita cukup di sie konsumsi saja. Sayang, wanitanya juga tak protes sehingga perlakuan ini menuju keabadian. Padahal wanita selalu bisa diandalkan sebagai instrumen kekuasaan, seperti kasus dharma wanita, wanita karya, wanita Kosgoro dan lain-lain di bawah Golkar.

Dalam ranah ekonomi tak kalah mengenaskan. Menurut Unesco, kontribusi wanita terhadap ekonomi mencapai 60 persen. Bentuknya berupa waktu yang mmerekagunakan untuk rumah tangga yang jelas tidak dibayar. Namun apa yang didapat wanita, mereka hanya mendapat 30 persen dari 60 persen yang diberikan. Memang benar, ada yang hilang dalam dunia wanita, yaitu dalam pergerakan. Meski dalam zona pendidikan wanita relatif setara, namun pendidikan tidak menciptakan kepemimpinan. Pemimpin hanya dapat diciptakan oleh pengalaman, yang ini sulit didapatkan karena hambatan budaya dan struktural. Penganut sistem ini percaya bahwa An-nisa' ayat 1 tentang *nafsin wahidatin* bermakna Hawa dari tulang rusuk Adam, bukan sebagai species yang sama (homo sapien).

Al-Tatwir merupakan jurnal ilmiah yang terbit satu kali setahun, setiap bulan Oktober. Diterbitkan oleh Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Jurusan Ushuluddin dan Dakwah STAIN Jember, jurnal ini dimaksudkan sebagai wahana pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, agamawan, intelektual, dan mahasiswa) dengan kajian Pengembangan Masyarakat Islam.

**Alamat Redaksi
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Telp. 0331-487550 Fax. 0331-427005**

